



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Imanudin bin Tarham Efendi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 001 RW 002, Kampung Sri Numpi, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Elis Umi Latifah binti Sartim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 001 RW 002, Kampung Sri Numpi, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara beserta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor: 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu. tanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak melaporkan pernikahan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Suryaman, dengan maskawin berbentuk uang Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Zainal S.Pd dan Abdul Rahman, kedua orang saksi saat ini masih dalam keadaan sehat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik orang tua Pemohon I Di Kampung Sri Nupi Kecamatan Bumi Agung, sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Afifah Fitiya binti Muhammad Imanudin, lahir pada tanggal 12 Mei 2014;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Imanudin bin Tarham Efendi**) dengan Pemohon II (**Elis Umi Latifah binti Sartim**) yang dilaksanakan di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 10 Februari 2013;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya terkait Isbat Nikah;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu. tanggal 28 Januari 2022, terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 9

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Suhartini, S.H.** sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00-
4. Biaya PNBP Relaa	Rp 20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp620.000,00-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)